

## **KEJUJURAN DAN ETIKA DALAM KONSEP POLITIK MACHIAVELLI**

**Nashar Akbar Muhammad**

Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
akbarnashar@gmail.com

**R. Yuli Akhmad Hambali**

Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
radeahambali@uinsgd.ac.id

### **Abstract**

*This article examines honesty and ethics in Machiavelli's concept of politics. This study is very important considering that Machiavelli is often referred to as an antagonist in the world of politics. His works are often misunderstood and interpreted as a suggestion to seize power at all costs. Therefore, this article is intended to provide an honest and proportional picture of Machiavelli's thoughts which are often interpreted as immoral and disregard for ethics. Literature study was chosen as the method used to analyze Machiavelli's political thoughts. In a number of literatures, the political thought initiated by Machiavelli is often seen as a strategy to overthrow power in a cruel way. On the contrary, Machiavelli always gives advice to gain power and defend it in a humanist way. As for what is considered cruel, it aims to enforce the law. Executing certain individuals would protect a much larger group. Making Italy a strong and prosperous country is Machiavelli's greatest wish. Machiavelli has done various ways to make this happen, because for him, nothing is more important to power than the welfare of the people and the creation of a strong state.*

**Keywords:** Ethics; Political Concept; State; Welfare of the people.

### **Abstrak**

*Artikel ini mengkaji tentang kejujuran dan etika dalam konsep politik Machiavelli. Kajian ini menjadi sangat penting mengingat Machiavelli sering disebut sebagai tokoh antagonis dalam dunia politik. Karya-karyanya sering disalahfahami dan ditafsirkan sebagai saran untuk merebut kekuasaan dengan segala cara. Karena itu, artikel ini dimaksudkan untuk memberi gambaran yang jujur dan proporsional tentang pemikiran-pemikiran Machiavelli yang kerap ditafsirkan sebagai orang yang amoral dan tidak mengindahkan etika. Studi kepustakaan dipilih menjadi metode yang dipakai untuk mengupas pemikiran-pemikiran politik Machiavelli. Dalam sejumlah literature, pemikiran politik yang digagas Machiavelli sering dianggap sebagai siasat dalam menggulingkan kekuasaan dengan cara yang kejam. Padahal sebaliknya, Machiavelli selalu memberikan saran untuk mendapatkan kekuasaan dan mempertahankannya dengan cara yang humanis. Adapun cara yang dirasa kejam, hal itu bertujuan untuk menegakkan hukum.*

*Mengeksekusi individu-individu tertentu akan melindungi kelompok yang jauh lebih besar. Menjadikan Italia negara yang kuat dan sejahtera adalah keinginan terbesar Machiavelli. Berbagai cara dia lakukan untuk mewujudkan itu. Karena bagi Machiavelli tidak ada yang lebih penting bagi kekuasaan selain kesejahteraan rakyat dan terwujudnya negara yang kuat.*

**Kata Kunci:** Etika; Kesejahteraan Rakyat; Konsep Politik; Negara.

## **A. Pendahuluan**

Machiavelli sering disebut sebagai seseorang yang tidak bermoral dan mengabaikan nilai-nilai keagamaan. Bukan tanpa alasan jika ia dituduh demikian, dalam karyanya *Il Principe* (Sang Pangeran), Machiavelli menegaskan sikap dan garis pemikirannya yang menurutnya harus diketahui banyak orang, meskipun itu tidak populer dan bernuansa negatif. Bahkan menurut Deliar Noer (1998), Machiavelli seperti menyuruh dan mengajarkan kepada siapapun untuk mengelabui atau menipu orang lain. Prasangka atau pendapat buruk soal Machiavelli bahkan datang dari beberapa tokoh politik dan ilmuwan. Henry Schmandt (2009), misalnya melancarkan kritik dan pernyataan pedas kepada Machiavelli. Menurutnya, Machiavelli dikenal sebagai bapak kelecikan politik. Ia merupakan inkarnasi dari kekuatan licik bahkan brutal dalam dunia politik, dan sebagai penggagas totalitarianisme modern.

Di tengah anggapan bahwa Machiavelli adalah tokoh politik yang licik dan kejam, Cailes (2012) memberi pandangan sebaliknya, *“I argue that Machiavelli is reasonably consistent in that: first, he does not present the brutality as a ‘good’, it remains an ‘outrage’, evil remains evil. Secondly, he does not advocate that such an example should be unconditionally followed, instead it is a conditional action to obtain certain ends”* (saya berpendapat bahwa Machiavelli sangat konsisten dengan itu (humanisme): dia tidak melihat kebrutalan sebagai hal yang baik, hal itu tetaplah kebiadaban, hal yang buruk tetaplah buruk. Kedua, dia tidak merekomendasikan suatu contoh untuk diikuti tanpa suatu syarat, tetapi hal itu (tindakan dehumanisasi) memerlukan suatu prasyarat untuk mendapatkan tujuannya (kekuasaan).

Senada dengan Cailes, Haikal (2011) mengungkapkan bahwa Machiavelli mengatakan itu (menggunakan tangan besi) dalam konteks tertentu ketika keadaan Italia saat itu memang sedang kacau, dan cara itu adalah opsi terakhir dari cara yang bisa dilakukan oleh penguasa Medici. Penelitian Daya (2017) membuka penglihatan kita tentang pemikiran Machiavelli bahwa walaupun Sang Pangeran (*Il Peincipe*) mengetengahkan berbagai saran bagi para penguasa untuk mengelola dan mempertahankan kekuasaannya, namun segi-segi humanisme Machiavelli juga terlihat. Sekalipun dia dicap sebagai orang yang amoral, tetapi buah pikirnya memberikan arah jarum jam yang berbeda. Jika meminjam teori sosialisme

humanisme Fromm, maka akan terlihat bahwa Machiavelli melihat persatuan umat manusia sebagai kunci sukses dalam membangun suatu imperium.

Anggapan bahwa Machiavelli sebagai seorang tokoh yang amoral, tidak bisa dilepaskan dari peran sudut pandang etika. Memahami etika, tentu tidak bisa hanya dengan melihat sekilas mata. Perlu kajian yang mendalam, sebab etika adalah sesuatu yang relatif, setiap wilayah memiliki standar baik dan buruk yang berbeda. Karena etika mengandung nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat (K. Bertens 2007).

Berdasarkan pengertian di atas, menjadi menarik ketika menyandingkan pembahasan etika dan politik, karena kedua hal tersebut dipahami sebagai sesuatu yang berseberangan dan sulit untuk disatukan. Politik dengan siasat-siasat yang terkadang menerobos batas-batas etika, disandingkan dengan konsep tentang benar dan salah. Namun yang menjadi pertanyaan selanjutnya, apakah benar politik selalu soal menerobos batas-batas etika, seperti yang selama ini sering terdengar di masyarakat? Jika merujuk pada teori klasik Aristoteles soal politik, bahwa politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan “*bonum commune*” (kebaikan bersama), apa yang dituliskan Machiavelli dalam bukunya Sang Pangeran menjadi hal yang wajar karena tujuan utamanya adalah demi terwujudnya negara yang jauh lebih baik.

Pada pengertian yang lain, Frans Magnis Suseno dalam bukunya Etika Politik menyatakan bahwa etika politik adalah bentuk pengkhususan dari etika dalam kehidupan politik atau kenegaraan. Etika yang membicarakan mengenai konsep benar dan salah, baik dan buruk ditarik dalam kehidupan bernegara. Sehingga benar dan salahnya sesuatu dilihat dari sudut pandang yang lebih spesifik, yaitu kehidupan bernegara. Frans mengatakan bahwa perbedaan antara etika politik, etika sosial dan etika yang lain terletak pada penerapannya dan fokus pembahasannya. Hal tersebut beriringan dengan penggunaan sudut pandang dalam memahami etika. Jika etika politik, maka melihat etika dalam sudut pandang dunia politik. Jika etika sosial, maka sudut pandang yang digunakan dalam konteks kehidupan sosial, dan begitu seterusnya.

Artikel ini disamping memberikan bukti dan sudut pandang berbeda dari seorang Machiavelli yang selama hidupnya dianggap amoral dan tidak humanis juga hendak menunjukkan tentang relevansi dan keterkaitan pemikiran Machiavelli dengan etika politik dan kekuasaan yang dipraktekkan dalam konteks hari ini. Apakah benar bahwa Machiavelli mengesampingkan nilai etika dalam konsep politiknya? Tulisan ini akan memberikan penjelasan yang mungkin jarang ditemui.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*). Sumber utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah dua karya dari Niccolo Machiavelli yaitu *The Prince* (Sang Pangeran) dan *Discourses* (Diskursus). Selain itu, informasi dari data sekunder seperti karya Dinar Hakim (2017), Giovanni Boccaccio (2019), Adisusilo (2013), Suhelmi (2001), dan lainnya dijadikan sebagai pembanding. Selanjutnya, peneliti mencoba untuk tidak pasif dalam membuka secara terang pemikiran Machiavelli di sekitar etika politik. Teori keadilan John Rawls dan teori politik Aristoteles sengaja dipakai untuk menelusuri liku-liku pemikiran Machiavelli dengan harapan pemikiran etika politik Machivelli menjadi tersingkap secara terang benderang.

## **C. Hasil Dan Pembahasan**

Niccolo di Bernardo Machiavelli, atau lebih sering dikenal dengan nama Niccolo Machiavelli, lahir pada tanggal 3 Mei 1469 di Firenze, Italia. Machiavelli merupakan anak kedua dari pasangan Bernardo Machiavelli dan Bartolomea de' Nerli (Dinar, 2017:35). Keluarga Machiavelli adalah keluar bangsawan di Florence meski jika melihat dari kekayaan yang dimiliki keluarganya, keluarga Machiavelli bukan bangsawan yang kaya raya. Ayah Machiavelli adalah ahli hukum di Florence, sehingga ketertarikannya pada dunia intelektual merupakan warisan ayahnya.

Pendidikan adalah hal yang utama dalam keluarga Machiavelli. Tahun 1476, Machiavelli muda mengenyam pendidikan di sekolah tata bahasa Tuscan. Di sekolah ini, Machiavelli mendapatkan pendidikan dasar membaca dan menulis, serta berhitung. Kemampuannya berbahasa Latin pun muncul dari tempaan sekolah ini. Di usia 12 tahun Machiavelli mempelajari ilmu-ilmu kemanusiaan di bawah asuhan Paulo Ponsiglione, seorang guru Latin yang paling terkemuka di Florence saat itu. Machiavelli muda kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Florence dengan bimbingan Marcello Virgilio. Di sana, Machiavelli mempelajari manuskrip-manuskrip klasik, menguasai karya-karya Latin dan Italia kuno, serta mempelajari sejarah (Suhelmi, 2001: 126-127).

Seluruh pendidikan yang diberikan keluarganya pada Machiavelli bisa disebut sangat menjamin masa depannya. Karena pada masa itu, ilmu pengetahuan adalah kunci dalam kehidupan yang baik dan menjanjikan. Kemampuan Machiavelli dalam menganalisis lingkungan sekitarnya baik sosial maupun politik, tentu tidak lepas dari peran guru-guru terbaik pada masanya. Pendidikan dengan kualitas terbaik inilah yang akhirnya membentuk kepribadian Machiavelli.

Politik dan Machiavelli telah menjadi dua hal yang sulit untuk dipisahkan dalam pembahasan apapun. Dalam diskursus politik, nama Machiavelli akan senantiasa muncul sebagai sebuah figure pengetahuan yang wajib dipelajari dan diteliti. Terlepas dari pro dan kontra di masyarakat luas, Machiavelli memiliki karir politik yang cukup gemilang.

Pada usia 25 tahun, Machiavelli mulai memahami kondisi politik di sekitarnya, khususnya ketika Italia diserang oleh Raja Charles VIII dari Perancis. Kesan mendalam didapatkan Machiavelli dari berbagai peristiwa yang dialaminya kala itu. Bersamaan dengan penyerbuan Raja Charles VIII, Machiavelli tampil sebagai pengamat politik kekuasaan Savonarola. Savonarola dalam pemerintahannya berusaha membangun negara yang teokratis dan demokratis, serta berupaya untuk menyingkirkan keluarga Medici. Savonarola dengan citranya sebagai politikus moralis dan membela kaum miskin serta melawan orang kaya. Selain itu, Savonarola memiliki reputasi dan otoritas yang cemerlang dan dikenal sebagai sosok yang alim. Tulisannya jernih dan cermah-ceramah keagamaannya mudah dipahami, tidak artifisial, dan alamiah (Hakim: 2017: 39).

Sebagai seorang pengamat politik, Machiavelli sempat mengagumi kepiawaian Savonarola. Namun di sisi lain, Machiavelli menyaksikan kegagalan Savonarola dalam mempertahankan negara karena tidak memiliki kekuatan politik dan militer. Dari sanalah Machiavelli memunculkan gagasan bahwa pemilikan kekuatan bersenjata menjadi jaminan untuk berbagai penaklukan dan menjadi jalan untuk menguasai mereka yang tak memiliki kekuatan senjata (Hakim: 2017: 40). Selain itu, keruntuhan Savonarola disebabkan karena tidak adanya dukungan penuh dari rakyat dan buruknya penerapan manajemen yang tidak didukung oleh kaum elit negara. Hal-hal inilah yang menyebabkan Savonarola jatuh dan kemudian dibunuh dengan cara dibakar. Pemerintahan Florence selanjutnya digantikan oleh Piero Soderini pada tahun 1498, yang merupakan teman baik Machiavelli. Pada masa pemerintahannya, Machiavelli diangkat sebagai konselor kedua serta sekretaris komisi “*Ten of Balia*”, komisi mengenai kebebasan dan perdamaian Republik Florence (Rapar, 1991: 16).

Karir politik Machiavelli semakin cemerlang setelah dirinya mendapat kedudukan yang tinggi di pemerintahan sipil Florence sebagai sekretaris *Second Chancery* selama 14 tahun. Dari sana Machiavelli semakin mengerti kehidupan politik Florence. Pekerjaannya yang tidak hanya mengurus soal-soal dalam negeri, tetapi juga urusan luar negeri membuat Machiavelli memiliki wawasan yang luas mengenai politik. Pekerjaan inilah yang mengantarkan Machiavelli menjalankan misi diplomatik ke sejumlah negara Eropa, seperti Perancis, Jerman, dan juga

negara kota di Italia sendiri. Dengan seluruh misi diplomatik ini (sebanyak 30 kali) telah menjadikan Machiavelli tidak hanya sosok pemikir yang memiliki kemampuan diplomasi yang hebat tetapi juga menjadikannya seorang analis kekuasaan modern yang pertama (Hakim, 2017: 41).

Puncak karir politik Machiavelli adalah ketika dia diberikan tanggung jawab untuk melatih pasukan Florence guna mengambil alih kekuasaan Pisa pada tahun 1509. Saat itu, Florence menyewa tentara bayaran yang dipimpin oleh Vitelli. Namun Vitelli ternyata diberi bayaran lebih oleh pemerintah Pisa. Hal ini membuat tentara bayaran tersebut berhenti melakukan serangan terhadap Pisa (Suhelmi, 2001: 129). Belajar dari kejadian Vitelli, Machiavelli memunculkan gagasan bahwa pemerintah harus memiliki tentara sendiri. Karena sehebat apapun tentara bayaran, mereka tidak bisa dipercaya. Dengan gagasan itu, Machiavelli diberi tanggung jawab untuk melatih 10.000 pasukan baru untuk pemerintah Florence. Dua tahun berselang (1509), Machiavelli mendapat kesempatan untuk merebut kembali Pisa dengan mengerahkan tentara hasil binaannya. Pada akhir 1509, Pisa akhirnya menyerah dan berhasil ditaklukan. Setelah ditaklukannya Pisa, Machiavelli mengembalikan Pisa ke Republik Florence. Dengan keberhasilan itu, Machiavelli semakin mendapat kepercayaan dari pemerintah.

Namun setelah itu, karir politik Machiavelli tidak bertahan lama. Pada tahun 1512 Machiavelli dibebastugaskan karena adanya pergantian kekuasaan. Pada awal tahun 1513 Machiavelli dicurigai terlibat dalam komplotan yang ingin menggulingkan kekuasaan Medici. Tuduhan yang dilayangkan padanya membuatnya ditangkap, disiksa, dan dipenjara. Tidak berlangsung lama, pihak berwajib membebaskan Machiavelli dengan syarat dia masih berada di wilayah Florence. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh orang terdekatnya yang masih berada di lingkungan kekuasaan. Perlakuan buruk yang diterimanya selama dipenjara tak membuatnya surut untuk tidak mencintai negaranya. Bagi Machiavelli negara berada di atas kepentingan lainnya. Kepada salah seorang sahabatnya, Machiavelli menuliskan surat yang mengungkapkan isi hatinya, *"I love my country more than my soul"* (Machiavelli, 2005: 27).

### **Etika Menurut Machiavelli**

Jenjang pendidikan yang memadai, lingkungan yang penuh dengan konflik, dan seluruh peristiwa besar yang dialami, telah menjadikan Machiavelli sebagai tokoh besar yang berhasil menyuntikkan gagasan-gagasan baru dan segar dalam dunia politik Italia, khususnya Florence saat itu. Pandangan-pandangannya mengenai kemiliteran, kekuasaan, diplomasi, hukum, keadilan, dan kepentingan bersama, membuat Machiavelli menjadi orang yang disukai dan dibenci dalam waktu

bersamaan. Jika gagasannya dirasa mengancam kekuasaan, seperti saat keluarga Medici kembali berkuasa, dia diburu, disiksa, dan dipernjara. Namun bagi sebagian lainnya, gagasannya adalah angin segar bagi kehidupan masyarakat Florence saat itu (Hakim, 2017: 43-48).

Menurut Machiavelli manusia selalu memiliki sifat ambisius, egois, tipu muslihat, dendam, dan takut. Maka tugas penguasa adalah mengendalikan itu semua, agar manusia tidak saling 'sikut' dalam mewujudkan ambisinya. Dan ini semua bisa dilakukan dengan etika politik seorang penguasa yang memiliki ketegasan dan strategi yang jitu sesuai dengan kondisi negaranya (Ali, 2010: 99). Dalam konteks politik, etika tidak hanya berurusan dengan urusan moral, kesantunan, dan kesopanan. Kesejahteraan dan kepentingan bersama menjadi hal yang jauh lebih penting dalam sebuah negara. Maka pengertian etika secara umum seperti yang dikemukakan K. Bertens bahwa, 1) etika adalah nilai-nilai moral dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya; 2) etika berarti asas atau disamakan dengan moral, dimana kata moral ini berasal dari bahasa latin *mos* (nilai moral) disebut juga kode etik; 3) etika yaitu ilmu tentang baik dan buruk (K. Bertens, 2007: 6). Maka menjadi kurang pas ketika etika secara umum disandingkan dengan etika dalam politik. Karena seperti yang dikatakan Machiavelli, bahwa setiap manusia memiliki ambisi, sifat egois, dendam, dan tipu muslihat, yang tentu akan sangat sulit jika dihadapi oleh pemimpin yang hanya mengedepankan kesopanan dan perilaku baik saja. Strategi yang jitu, dan kecakapan dalam melihat 'musuh' menjadi hal penting. Jika musuh yang dihadapi adalah mereka yang bersenjata, rasanya tidak mungkin melawannya dengan nasehat atau ajakan untuk tidak saling menyakiti hanya karena ada anggapan menggunakan senjata dan saling menyakiti salah secara moral ataupun etika.

Selaras dengan gagasan yang dikemukakan oleh Machiavelli bahwa masalah etika dalam politik tidaklah sama dengan cara pandang para pemikir Yunani Kuno. Akan tetapi etika politik adalah ketika rakyat dapat kesejahteraan, kedamaian, keadilan, serta penguasa dapat mengendalikan negara dengan baik, sehingga negara menjadi kuat. Konsep yang digagas oleh Machiavelli bukan hanya soal mendapatkan kekuasaan, tapi lebih jauh lagi Machiavelli ingin para penguasa mementingkan kehormatan dan kebahagiaan bangsanya (Ali, 2010: 75). Bahkan dalam karyanya, Machiavelli menuliskan:

*"Yet it cannot be called talent to slay fellow citizens, to deceive friends, to be without faith, without mercy, without religion; such methods may gain empire, but not glory"* (Namun itu tidak bisa disebut kemampuan jika membunuh warga sipil, menipu teman, tidak

memiliki iman, tidak memiliki belas kasihan, tidak memiliki agama; dengan cara itu tentu bisa mendapatkan kekuasaan, tapi tidak dengan kemuliaan” (Machiavelli, 2005: 56-57).

Penguasa bisa melakukan apapun untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaannya. Bahkan dengan cara yang kejam dan licik pun, itu bisa mereka lakukan. Mereka juga akan mendapatkan apa yang mereka inginkan, namun tetap saja, jika mereka melakukannya dengan cara-cara ‘kotor’ maka mereka tidak akan pernah mendapat kemuliaan dari perbuatannya.

Mengacu pada gagasan Machiavelli mengenai etika dan kekuasaan, Machiavelli nampak memberi gambaran yang riil dan mungkin akan terjadi di lingkungan sosial. Hasil analisis ini yang mendorong Machiavelli untuk menyodorkan sesuatu yang buruk (secara moral) dengan resiko yang menyertainya, dan sesuatu yang baik (secara moral) dengan resiko yang menyertainya juga. Kebijaksanaan penguasa dalam memilih jalan yang akan diambil menjadi hal yang tidak bisa diabaikan. Machiavelli memberi pilihan, namun keputusan tetap berada di tangan penguasa.

Pada titik ini dapat dilihat bahwa ada sebuah kejujuran yang nampak dari gagasan-gagasan yang dikemukakan Machiavelli. Sebagai seorang penasihat politik di sebuah negara Machiavelli tidak hanya menyampaikan sesuatu yang ‘manis’ untuk dikonsumsi oleh penguasa tetapi juga menyuguhkan semua kemungkinan; pahit dan manis. Maka kebijaksanaan penguasa dalam mengambil langkah adalah hal yang mutlak. Dan bukankah kejujuran adalah bagian paling penting dalam melihat seseorang itu bermoral atau tidak?

### **Konsep Politik Machiavelli**

Politik dan negara adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Seperti kata Aristoteles, bahwa politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan “*bonum commune*” (kebaikan bersama). Kepentingan rakyat banyak adalah kepentingan tertinggi yang harus selalu diutamakan oleh penguasa, dan juga diperjuangkan.

Nasehat-nasehat dan saran yang dikemukakan Machiavelli seperti yang tertulis di bukunya *The Prince* memang menampakkan bahwa dia adalah orang yang kejam dan tak punya hati. Dengan kalimat-kalimat seperti:

“... *it is much safer to be feared than loved..*” (.. lebih baik jika pemimpin itu ditakuti daripada dicintai..) atau “... *in seizing a state, the usurper ought to examine closely into all those injuries which it is necessary for him to inflict, and to do them all at one stroke so as not to have to repeat them daily...*” (dalam merebut kekuasaan sebuah negara, sang penguasa

haruslah menjalankan rencana jahatnya seketika, sehingga dia tidak harus melakukannya setiap hari).

Boleh jadi, dari dua ucapan Machiavelli di atas, akan muncul anggapan bahwa Machiavelli seorang yang sangat kejam dan tidak berprikemanusiaan. Tetapi, ucapannya di atas haruslah diletakkan dalam konteks yang lebih luas dan utuh manakala Machiavelli mengatakan bahwa:

*“whether it be better to be loved than feared or feared than loved? It may be answered that one should wish to be both, but, because it is difficult to unite them in one person, it is much safer to be feared than loved, when, of the two, either must be dispensed with. Because this is to be asserted in general of men, that they are ungrateful, fickle, false, cowardly, covetous, and as long as you succeed they are yours entirely; they will offer you their blood, property, life, and children, as is said above, when the need is far distant; but when it approaches they turn against you”* (Machiavelli, 2005:98).

Idealnya pemimpin dapat melakukan keduanya; ditakuti dan dicintai. Namun kedua hal tersebut sangat sulit jika dilakukan secara bersamaan. Maka jauh lebih aman bagi pemimpin untuk lebih ditakuti daripada dicintai. Bukan tanpa alasan, Machiavelli meyakini bahwa cinta menuntut sebuah tanggung jawab, dan pasang-surut dalam mencintai akan membahayakan pemimpin itu sendiri. Namun apabila rasa takut; selama sikap pemimpin sejak awal memang tegas dan *straight*, maka hal itu akan lebih bertahan lama. Nampak jelas bahwa Machiavelli tidak pernah memberi satu opsi, buruk ataupun baik, tanpa alasan yang jelas dan rasional. Tentu saja sesuai dengan keadaan sosial-politik saat itu, dan di negara di mana Machiavelli berada.

Pada karyanya, *The Prince*, Machiavelli menginginkan adanya pengetahuan soal pembangunan negara yang kokoh. Pemikirannya dipengaruhi oleh kemunculan gerakan-gerakan sentrifugal untuk membentuk negara bangsa. Ada beberapa hal yang dipertimbangkan dalam membangun suatu negara. Pertama, kedaulatan tertinggi ada di tangan penguasa, serta prinsip-prinsip hukumnya; kedua, negara harus memiliki militer yang kuat; ketiga, penguasa harus belajar dari kekuasaan di masa lampau, dan kekuasaan di negara lain; selain itu penguasa harus mengetahui sifat terpuji dan tidak terpuji (Suhelmi, 2001: 130-137).

Pada poin pertama bahwa, kendali sebuah negara yang hendak maju terdapat pada tangan penguasa, termasuk prinsip hukum yang berlaku. Tentu pergantian kekuasaan harus dilakukan dengan penuh. Penguasa lama harus sepenuhnya tergantikan, seperti yang tertuang dalam buku *The Prince* karya Machiavelli:

“... siapapun yang memperoleh pemilikan atas wilayah tertentu dan ingin mempertahankan wilayahnya, harus mengecahkan dua hal. Pertama, darah penguasa lama harus dihapuskan. Kedua, jangan mengubah hukum atau kebiasaan mereka. Apabila dilanggar maka mereka akan cepat bersatu dan membentuk sebuah negara. Namun bila dominasi diperoleh di wilayah yang berbeda bahasa, hukum, dan kebiasaan, maka kesulitan yang harus dihadapi semakin besar dan menuntut nasib baik dan usaha besar untuk mempertahankannya. Salah satu cara terbaik adalah penguasa harus menetap di sana” (Machiavelli, 2005: 41).

Adapun cara lain yang lebih efektif disarankan oleh Machiavelli, seperti yang dilakukan Agathocles. Dia membunuh secara biadab semua senator Syracuse demi mendapatkan kekuasaan. Akan tetapi, dengan cara yang keji dalam merebut kekuasaan, menjadikan dia tidak dihormati dan dipuja sebagai pahlawan (Suhelmi, 2001: 134).

Machiavelli selalu menekankan bahwa hukum harus senantiasa ditegakkan oleh penguasa. Karena dengan hukum yang jelas dan tegas, seorang penguasa akan disegani serta dihargai, baik oleh rakyatnya ataupun oleh penguasa dari negara lain. Bahkan Machiavelli mengatakan, jika harus menghukum seseorang dengan cara yang keji, maka lakukanlah, jika hukum itu memang berlaku di wilayah tersebut. Menghukum satu orang untuk menyelamatkan rakyat lainnya, bukanlah sesuatu yang salah. Suatu peraturan dapat melukai seluruh komunitas, namun eksekusi oleh penguasa hanya melukai individu-individu tertentu.

Sebagaimana yang diungkapkan John Rawls (1971) yang menerangkan soal konsep keadilan dalam sebuah negara. Setidaknya ada dua poin yang sangat beririsan dengan gagasan Machiavelli. *Pertama*, bahwa masyarakat harus turut aktif dalam diskursus guna menentukan konsep keadilan dan hukum di sebuah wilayah. Juga, masyarakat harus patuh terhadap hukum yang telah mereka buat. Hal ini menguatkan gagasan Machiavelli bahwa sebenarnya tidak ada yang salah dengan hukuman yang nampak keji jika memang itu yang berlaku di wilayah tersebut. Dan penguasa tidak dianjurkan untuk datang dan merebut kekuasaan, dengan melukai rakyat sipil, juga mengacak-acak hukum serta kebiasaan yang ada di sebuah wilayah. Bahkan Machiavelli menyarankan bahwa penguasa yang menduduki wilayah baru, hendaknya menempati wilayah tersebut agar dapat mengetahui permasalahan rakyat yang di bawahnya dan dapat berkomunikasi dengan bahasa yang mereka gunakan.

*Kedua*, bahwa konsep keadilan bukanlah menyamaratakan peran dalam lapisan masyarakat. Bangsawan, orang kaya, pedagang, militer, dan rakyat sipil memiliki perbedaan dalam perannya masing-masing bagi sebuah negara. Tanggung jawabnya pun berbeda. Akan tetapi, Machiavelli

yang dianggap sebagai orang yang melegalkan totaliterianisme mengungkapkan bahwa rakyat biasa memiliki kesempatan sebagai pemimpin.

*“Seorang rakyat biasa mampu menjadi penguasa bukan dengan jalan kejahatan ataupun kekejaman, tetapi karena jasa baik sesama rakyat. Mereka yang berhasil meraih kekuasaan, terjadi bukan semata-mata karena keberuntungan. Orang yang menjadi penguasa atas dukungan rakyat harus mempertahankan persahabatan dengan rakyat agar tidak terjadi penindasan. Seorang penguasa yang bijaksana harus menemukan cara agar rakyat selalu menggantungkan diri padanya dan kepada kekuasaannya dalam keadaan apapun”* (Machiavelli, 2005:73-79).

Dengan demikian Machiavelli menjelaskan bahwa, peran rakyat adalah mematuhi apa yang penguasa perintahkan selama itu sejalan dengan hukum yang berlaku. Peran militer adalah sebagai angkatan perang dan pelindung sebuah negara dan kekuasaan. Peran bangsawan dan orang kaya adalah untuk menyeimbangkan keadaan ekonomi dalam sebuah negara. Apabila peran dalam lapisan masyarakat ini tertukar atau dipaksa ditukar, maka keadilan tidak akan pernah dapat terwujud.

Pada poin kedua, Machiavelli menegaskan bahwa, sebuah negara yang kuat harus memiliki militer dan hukum yang kuat.

*“The chief foundations of all states, new as well as old or composite, are good laws and good arms; and as there cannot be good laws where the state is not well armed, it follows that where they are well armed they have good laws”* (Machiavelli, 2005: 73).

Negara baru maupun negara lama, jika memang ingin kokoh dan kuat, harus memiliki undang-undang dan militer yang kuat. Keduanya saling terkait, hukum yang kuat akan melahirkan militer yang kuat, begitupun sebaliknya. Dalam konteks ini, Machiavelli selalu menekankan bahwa sebuah negara harus memiliki militer sendiri. Artinya, mereka yang dilatih negara secara langsung untuk kepentingan militer.

Tentara bayaran dan tentara asing hanya akan membuat kekuasaan melemah dan mereka sangat berbahaya. Seperti kejadian Vitelli yang diceritakan oleh Machiavelli bahwa, Vitelli diperintah oleh penguasa Florence untuk menyerang Pisa agar mereka menyerah dan kembali bergabung dalam kekuasaan Florence, tetapi pasukan Vitelli malah menghentikan serangannya, karena ternyata pemerintah Pisa memberi bayaran lebih pada Vitelli dan pasukannya. Loyalitas adalah hal yang paling penting dalam diri tentara di sebuah negara, jika ingin membuat negara yang kuat. Kisah kuno perlawanan David dan Goliath dapat diambil sebagai ilustrasi. Kala itu David ditawarkan oleh Saul bantuan pasukan untuk

bertarung melawan Goliath. Akan tetapi David menolaknya. Dia percaya bahwa mempergunakan pasukan orang lain hanya akan membuat konsentrasinya tertanggung dan membebaninya. Akhirnya dia memilih berjuang menggunakan pisaunya.

Demikian juga terkait dengan hukum bahwa, hukum yang kuat adalah hukum yang disetujui oleh seluruh rakyatnya. Hukum menciptakan aturan, aturan itu menjadi hal yang penting dan mengikat bukan karena merupakan perintah dari penguasa, melainkan karena aturan tersebut diterima oleh masyarakat dan berlaku di masyarakat. Aturan bertindak sebagai pengatur perilaku manusia yang terikat dengan bagaimana masyarakat merespon aturan tersebut, dan perilaku yang sesuai dengan aturan (Hart, 1994: 56).

Maka menjadi hal yang cukup sulit, ketika khalayak menilai bahwa hukum di suatu negara itu terlihat kejam dan tidak manusiawi. Karena ketika rakyat dan pemimpin menghendaki berlakunya sebuah hukum, apapun itu, maka hukum itu akan berlaku. Kejam ataupun tidak kejam menjadi relatif dan tergantung sudut pandang mana yang hendak diambil.

Pada poin ketiga, Suhelmi (2001) mengatakan bahwa, penguasa juga harus belajar dari penguasa sebelumnya dan penguasa yang berkuasa di tempat lain. Seorang penguasa akan tahu caranya bertempur, bertahan dari musuh, dan melakukan serangan yang efektif apabila mereka belajar dari penguasa-penguasa sebelumnya. Seperti Alexander “The Great” yang seringkali mencontoh langkah Achilles yang gagah berani dalam berperang.

Oleh karenanya, Machiavelli sangat termotivasi untuk mengembalikan kejayaan Italia yang sempat menjadi perebutan Spanyol, Prancis, dan Kepausan. Dia mengacu pada kejayaan Romawi Kuno. Para penguasa dituntut harus belajar dari penguasa sebelumnya yang tidak pernah kompromi jika berkaitan dengan urusan negara. Salah satu kisah menarik yang dipaparkan Machiavelli adalah keteladanan Romulus dan kerapuhan Numa Pompilius, sebagaimana yang diungkapkan Machiavelli dalam bukunya yang berjudul Diskursus:

*“... after whom there followed Ancus, so gifted by nature that he was able to use peace and endure war. And first he addressed himself to want to hold the ways of peace, but he soon knew that his neighbors judging him effeminate esteemed him little, so that he decided that if he wanted to maintain Rome he needed to turn to war and imitate Romulus, and not Numa. Let all the Princes who have a State take example from this, that he who imitates Numa may keep it (the State) or not keep it, according as the times and fortune may turn his way; but he who imitates Romulus, and is like him armed with prudence and weapons, will keep it in any case...”* (Machiavelli, 2015: 37).

Berdasarkan cerita Machiavelli di atas, Ancus yang dianugerahi oleh Tuhan keseimbangan antara kemampuannya dalam berperang dan mengambil jalan damai, mulanya lebih condong untuk melakukan cara-cara yang damai. Akan tetapi dia menyadari bahwa pemimpin-pemimpin di negara tetangganya menganggap dirinya banci dan sedikit mengejeknya; dari sana dia menyadari bahwa jika ingin mempertahankan Roma, dia harus mengabdikan diri pada perang, dan meniru Romulus (yang mengabdikan dirinya pada perang dalam mempertahankan negaranya), bukan Numa Pompilius; yang lebih sering mengambil jalan damai. Semua penguasa yang memerintah negara ini mengambil contoh dari peristiwa ini, bahwa dia yang mengikuti cara Numa dapat mempertahankan atau kehilangan tahta, tergantung kesempatan dan kondisi; namun bagi siapa saja yang mengikuti cara Romulus, dan mengombinasikan keberanian serta kebijaksanaan, akan tetap dapat mempertahankan tahta, apapun yang terjadi.

Kebijaksanaan adalah dasar dalam berfilsafat. Ahmad Tafsir (2015) dalam bukunya menjelaskan, secara etimologi, filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu *Philosophia*; *philos* adalah cinta, dan *shopia* adalah kebijaksanaan. Machiavelli dalam berbagai gagasannya selalu menyelipkan saran-saran yang perlu kebijaksanaan bagi mereka yang menerima saran itu. Sehingga keberanian dan strategi yang dianggap hanya mengutamakan peperangan tidak dapat diidentikan dengan Machiavelli sebagai sesuatu yang buruk. Peperangan tentu diperlukan pada masa-masa itu, dan kebijaksanaan penguasa menjadi penyeimbang bagi mereka untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan.

Poin terakhir, seorang penguasa harus mengetahui dan mempelajari tentang sifat terpuji dan sifat tidak terpuji. Hal ini menjadi sangat penting karena penguasa akan tahu dan akan dapat menempatkan dirinya sekaligus mengamankan negara dari segala ancaman serta tantangan yang ada. Seorang penguasa bersedia menegakkan hukum sekalipun dianggap kejam demi melindungi rakyatnya bersatu dan setia. Hal ini dikarenakan dia akan lebih berbelas kasih daripada mereka yang membiarkan timbul kekacauan sehingga terjadi pertumpahan darah, ungkap Machiavelli.

Mempertahankan keutuhan sebuah negara dan kedamaian di masyarakat jauh lebih penting, meski dengan cara yang kejam. Karena kekacauan di sebuah negara tidak dapat dibiarkan terus bertumbuh, dikarenakan kekacauan yang tidak diatasi dengan segera, akan merembet dan terus membesar. Sehingga keamanan dan kenyamanan sebuah negara menjadi tidak terkendali.

Dengan mengabaikan moralitas, Machiavelli telah melakukan desakralisasi politik. Dia menghapus kerangka politik dari acuan religious

(Perry, 2012: 306). Sekaligus membuka berbagai jalan dalam membangun demokrasi yang lebih modern, yang kemudian dikembangkan oleh para filsuf modern (Adisusilo, 2013:94). Apa yang kelak dikenal sebagai teori kontrak sosial mungkin saja terinspirasi dari Machiavelli. Dua pemikir politik Inggris pada abad ke-17 nampak memiliki dua teori kontrak sosial yang serupa. Hobbes dengan teori hukum rimbanya; siapa yang kuat dia yang bertahan, menggambarkan manusia seperti srigala. Manusia tidak akan berhenti merampas dan bahkan membunuh orang lain sehingga mereka mendapat kebahagiaan dan kesejahteraan yang mereka inginkan. Locke dengan teori tabularasanya, melihat manusia sebagai kertas putih tanpa noda. Manusia hidup dengan kebahagiaan dan kesejahteraan sampai mereka merasa mendapatkan sesuatu. Keinginan saling memiliki itu yang membuat mereka saling berebut satu sama lain, yang kemudian mengakibatkan terjadinya konflik dan perang. Keadaan perang menuntut Hobbes dan Locke mencari jalan keluarnya. Menurut Wijaya (2016) dalam jurnalnya, mereka seirama untuk mengajukan kontrak sosial sebagai jalan perdamaian di mana negara akan menjamin keadilan dan kesejahteraan rakyat. Akan tetapi, negara ideal bagi mereka juga berbeda. Hobbes mendambakan kekuasaan mutlak dan Locke pemisahan kekuasaan.

Oleh karenanya, untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan di sebuah negara, pemimpin perlu menempatkan sifat terpuji dan tidak terpuji di tempat yang seharusnya. Ketika penguasa mengetahui tentang sesuatu yang buruk yang biasanya dimiliki penguasa, mereka bisa menghindari itu, dan menampakkan sifat sebaliknya di depan rakyat. Namun jika dirasa rakyat sedang ingin melihat sisi gelap dan bengis dari penguasa, agar mereka nampak kuat sebagai seorang raja, dan mereka merasa aman karena memiliki raja yang kuat, maka mereka bisa menampakkan sifat yang bengis tersebut di depan rakyatnya.

Aristoteles pernah mengatakan bahwa, penguasa harus bisa melayani rakyat, karena pada banyak kesempatan rakyat juga berperan sebagai pelayan para penguasa. Menjadi seseorang yang membuat rakyat merasa aman adalah satu dari banyak cara dalam melayani rakyat.

Demikian juga Formm pernah mengatakan, persatuan antara rakyat dan penguasa adalah sesuatu yang sangat didambakan di seluruh negara. Persatuan ummat manusia adalah kunci dalam membangun suatu imperium. Machiavelli (2005: 40) mengungkapkan “*jadi tuan menemukan musuh yaitu orang-orang yang tuan lukai dengan menduduki dominion itu dan tuan tak bisa memelihara persahabatan dengan mereka yang telah membantu tuan dalam memperoleh kekuasaan... tuan akan selalu membutuhkan kemurahan hati penduduk dalam memperoleh suatu wilayah... sebab inilah yang membuat Louis XII dari Perancis segera kehilangan Milan kendati mampu mendudukinya tanpa kesulitan.*”

Jika dilihat dengan menggunakan pandangan yang jernih, maka Machiavelli menyarankan bahwa penguasaan atas suatu wilayah tanpa menguasai penduduknya adalah sebuah kesalahan. Karena cepat atau lambat mereka akan memberontak dan kekuasaan tidak akan stabil. Dia merasa bahwa kemanusiaan harus ditempa dari kebersamaan antar manusia itu sendiri. Manusia yang satu dengan manusia yang lainnya seharusnya saling menghargai untuk menjaga kepemilikan bersama. Wajar apabila kemudian Machiavelli (2005: 44) percaya bahwa “penguasa wilayah asing... harus menjadikan dirinya sebagai pemimpin dan pelindung atas negara-negara tetangganya yang kurang kuat.”

Sebaliknya, lemahkan negara-negara yang lebih kuat dan waspadalah agar mereka tak diinvasi kekuatan asing yang tak sekuat dirinya. Di wilayah-wilayah yang dikuasai kaum Romawi, mereka selalu menerapkan kebijakan ini. Mereka mendirikan koloni, merangkul pihak yang lemah tanpa membuat kekuatan mereka meningkat, mendudukan pihak yang kuat dan tidak membiarkan penguasa asing punya pengaruh di sana.” Gagasan yang dikemukakan Machiavelli tersebut nampak berlawanan dengan apa yang selama ini menempel pada dirinya bahwa dia adalah orang yang tidak memiliki moral dan etika, juga sangat kejam dan tidak berpr kemanusiaan. Kepentingan orang banyak, stabilitas dan keamanan negara, menghindari *chaos* yang lebih besar, dan melanggengkan kekuasaan dengan merangkul rakyatnya adalah cara-cara yang disarankan Machiavelli bagi para penguasa. Sudut pandang ini yang sering luput oleh khalayak dalam menerka dan mempelajari cara berpikir Machiavelli.

#### D. Simpulan

Machiavelli memberikan gambaran yang cukup jelas bahwa etika dalam dunia politik tidak cukup hanya membicarakan tentang baik dan buruk. Keadaan negara yang begitu kompleks, dengan ambisi-ambisi tiap warga negara yang berbeda-beda, etika dalam kekuasaan harus lebih dilebarkan lagi dalam prakteknya. Menjaga negara tetap aman, menghindari *chaos* yang lebih besar, mengeksekusi individu-individu tertentu untuk melindungi kelompok yang lebih besar, adalah bagian dari etika politik yang dipegang oleh Machiavelli. Bukan semata-mata untuk kekuasaan dirinya, karena faktanya Machiavelli tidak pernah menjadi penguasa tertinggi dalam sebuah negara.

Kecintaan Machiavelli terhadap negara Italia melebihi kecintaannya pada apapun, termasuk pada dirinya sendiri. Kejujuran dalam pemaparan berbagai gagasannya acap kali menghadirkan multitafsir dari para pembaca. Terlepas dari itu semua, Machiavelli mendasarkan setiap gagasannya pada kenyataan yang dia lihat dan alami ketika menjadi rakyat

biasa, atau ketika dia berada di pemerintahan. Semangatnya dalam membangun negara Italia berimbas pada dirinya yang dianggap sebagai seorang yang amoral dan tidak mengindahkan kemanusiaan. Namun jika melihatnya secara lebih luas dan dalam, semua yang dia lakukan justru untuk mempertahankan keutuhan sebuah negara. Konsep politiknya menjadi pembaharuan di dunia politik Italia saat itu, sebelum kemudian menjadi pembaharuan juga di politik global.

Apa yang telah dipaparkan di atas, tidak bermaksud membantah apalagi menandingi literatur-literatur sebelumnya berkaitan dengan gagasan dan pemikiran Machiavelli. Artikel ini sengaja ditulis sebagai upaya menelusuri dan mengungkap pemikiran Machiavelli berkenaan dengan etika politik dengan melihat konteks kehidupannya. Keterbatasan literatur dan bahasa dalam menerjemahkan karya-karyanya menjadi celah yang bisa diisi oleh peneliti selanjutnya dalam kajian tentang Machiavelli.[]

## DAFTAR PUSATAKA

- Adisusilo, S. (2013). *Sejarah Pemikiran Barat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Boccacio, G. (2019). *Kisah-Kisah dari Italia*. Yogyakarta: Penerbit Basabasi.
- Chailes, M. J. (2012). Renaissance Ideas of Peace and War, and the Humanist Challenge to the Scholastic Just War: The Disputatio De Pace Et Bello of 1468; Erasmus and Machiavelli. *Disertasi*.
- Diana, R. (2018). Etika Politik dalam Perspektif Al-Mawardi. *Universitas Darussalam Gontor*.
- Djaja, W. (2015). *Sejarah Eropa: Dari Eropa Kuno hingga Eropa Modern*. Yogyakarta: Ombak.
- Hakim, D. (2017). *Una Biografia di Niccolo Machiavelli*. Yogyakarta: Penerbit Socially.
- Hart, M. (1989). *Seratus Tokoh Paling Berpengaruh dalam Sejarah*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Machiavelli, N. (2005). *The Prince*. Surabaya: Selasar.
- Machiavelli, N. (2015). *Diskursus*. Yogyakarta: Narasi.
- Mujahid, H. (2011). Etika dan Kekuasaan. *Skripsi Etika dan Kekuasaan: Pemikiran Niccolo Machiavelli atas Etika dan Kekuasaan*, 51-62.
- Perry, M. (2012). *Peradaban Barat I*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Puspitasari, S. H. (2001). Jurnal Konstektualisasi Pemikiran Machiavelli tentang Kekuasaan-Tujuan Negara.
- Rapar, J. H. (1991). *Filsafat Politik Machiavelli*. Jakarta: Rajawali Press.
- Rawls, J. (1971). *The Theory of Justice*. United States: Harvard University Press.

- Sugiyono. (2019). Konsep Etika dalam Perspektif Ali Syari'ati. *STAI Al-Aqidah Al-Hasyimiyyah*.
- Suhelmi, A. (2001). *Pemikiran Politik Barat*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Syam, F. (2007). *Pemikiran Politik Barat*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wijaya, D. (2017). Humanisme menurut Niccolo Machiavelli. *Universitas Negeri Malang*, 1-8.
- Wijaya, D. N. (2016). Kontrak Sosial menurut Thomas Hobbes dan John Locke. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*.
- Wowowr, A. (n.d.). Teologi dan Etika Politik dalam Gereja di Zaman Post-Modern. *Jurnal Institut Agama Kristen Manado*.
- Zein, F. (2016). Kritik Konsep Politik Machiavelli dalam Perspektif Etika Politik Islam. *Jurnal IAIN Surakarta*.